

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap pelaksanaan program penyuluhan keluarga berencana (KB) oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Kota Gunungsitoli dalam upaya penurunan angka stunting, dapat disimpulkan beberapa hal sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Kinerja tim penyuluh KB Dinas P5A Kota Gunungsitoli dalam memberikan penyuluhan dinilai cukup baik dan progresif. Hal ini tercermin dari sistem evaluasi yang berbasis data kuantitatif dan kualitatif, pengawasan lapangan yang terkoordinasi dengan baik lintas sektor, serta adanya dukungan dalam bentuk pelatihan teknis dan non-teknis, pemberian insentif, dan fasilitas pendukung. Penyuluh tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara adaptif dan kontekstual.
2. Strategi penyuluhan yang digunakan tim penyuluh KB terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, perencanaan keluarga, dan pola hidup sehat. Pendekatan interpersonal yang dilakukan secara door-to-door, penggunaan bahasa yang sederhana, alat bantu visual, serta demonstrasi langsung terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan tokoh lokal dan kelompok perempuan juga turut memperkuat penyebaran informasi dan internalisasi nilai-nilai kesehatan dalam keluarga. Efektivitas penyuluhan tidak hanya terlihat dari data statistik, tetapi juga dari perubahan perilaku nyata di tingkat rumah tangga.
3. Keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh komitmen pimpinan, validitas data lapangan, sinergi lintas sektor, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyuluh. Namun, beberapa hambatan masih menjadi tantangan utama, seperti

keterbatasan jumlah penyuluh, hambatan geografis, resistensi sosial-budaya, serta kurangnya media edukatif yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada integrasi pendekatan kelembagaan, adaptasi terhadap konteks lokal, dan inovasi dalam strategi penyuluhan.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi Sumber Daya Penyuluh

Pemerintah daerah perlu menambah jumlah penyuluh KB dan memastikan distribusi mereka merata, terutama di wilayah sulit dijangkau. Selain itu, penyusunan rasio penyuluh terhadap jumlah desa atau keluarga sasaran harus disesuaikan dengan beban kerja riil di lapangan.

2. Pemanfaatan Media Edukatif Inovatif

Dinas P5A disarankan mengembangkan media penyuluhan berbasis audio-visual dan digital yang lebih menarik dan mudah dipahami, terutama bagi masyarakat dengan tingkat literasi rendah. Konten lokal dan narasi berbasis pengalaman nyata masyarakat dapat meningkatkan daya terima pesan edukatif.

3. Penguatan Sinergi Lintas Sektor dan Komunitas

Kolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama, organisasi perempuan, serta lembaga pendidikan perlu diperluas agar pendekatan edukasi menjadi lebih menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada penyuluh sebagai satu-satunya sumber informasi. Perlu dibentuk tim kolaboratif yang berfungsi sebagai jaringan pendukung edukasi di tingkat desa.

4. Peningkatan Kapasitas Berbasis Konteks Lokal

Program pelatihan bagi penyuluh sebaiknya lebih diarahkan pada pendekatan berbasis konteks sosial dan budaya lokal. Hal ini penting untuk menciptakan metode komunikasi yang lebih empatik, tidak menggurui, dan mampu menjembatani resistensi yang berasal dari norma atau kepercayaan tradisional.

5. Percepatan Digitalisasi Sistem Pelaporan dan Evaluasi

Pengembangan aplikasi pelaporan berbasis data real-time perlu dipercepat dan disertai dengan pelatihan teknis kepada seluruh penyuluh dan petugas lapangan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan lanjutan.

6. Formulasi Kebijakan Responsif Berbasis Data Lapangan

Diperlukan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Hasil evaluasi di lapangan harus dijadikan dasar utama dalam menetapkan arah strategi baru dan bukan sekadar mengikuti instruksi dari tingkat atas, agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat sasaran.